A

TERKENDALI

LAPORAN HASIL

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
DI PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB
TRIWULAN I TAHUN 2022
Periode Januari 2022 – Maret 2022

Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi RI
Nomor 14 Tahun 2017

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB
KABUPATEN BANTUL, D.I. YOGYAKARTA

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB
Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711
Telp/Faks: 0274 – 367348,
Laman: www.pn-bantul.go.id
Pos-el: surat@pn-bantul.go.id
BANTUL

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN
HASIL SURVEI INDEK KEPUASAN MASYARAKAT
PENGGUNA PENGADILAN
DI PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB
TRIWULAN I TAHUN 2022

Berdasarkan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
RI
Nomor 14 Tahun 2017

Disahkan di Bantul
Pada hari Jumat, Tanggal 01 April 2022
KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

AMINUDDIN, S.H., M.H.
NIP. 196509031992031003

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, telah disusunnya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan di Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB Triwulan I Tahun 2022 ini;

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei Kepuasan Masyarakat kepada pengguna layanan. Mengingat jenis layanan publik sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka survei Kepuasan Masyarakat dapat menggunakan metode dan teknik survei yang sesuai. Berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB melaksanakan survei kepuasaan masyarakat dalam rangka pelaksaaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik sekaligus sebagai persyaratan untuk dilakukan penilaian kembali dalam penilaian Akreditasi oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Sebagai pertanggungjawaban atas kinerja Tim survey, penyusunan Laporan ini juga bermaksud untuk memberikan informasi bahwa Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil;

Semoga hasil survey ini dapat membantu memberikan masukan yang positif bagi Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB dan sekaligus menjadi acuan untuk meningkatkan pelayanan bagi pengguna layanan pengadilan mampu stakehalder serta sebagai bahan untuk mengevaluasi kinerja organisasi agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih efektif dan efisien;

Demikian Laporan Survey Kepuasan Pengguna Pengadilan pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB Triwulan I Tahun 2022 ini disusun dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bantul, 31 Maret 2022

Koordinator Tim survey

M. AWAB ABDULAH, S.H.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL I
LEMBAR PENGESAHAN II
KATA PENGANTAR III
DAFTAR ISI V

BAB I . PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Tujuan dan Sasaran 1
C. Tahapan Pelaksanaan 2
D. Tahapan Pelaksanaan 2

BAB II. METODOLOGI PENELITIAN 4

A. Teknik Pengumpulan Data 4
B. Metode Penelitian 4
C. Populasi Dan Sampel 4
D. Lokasi Penelitian dan Unit Analis 4
E. Variabel Pengukuran SKM 4
F. Teknik Analis Data 6

BAB III. PROFIL RESPONDEN 7

A. Umur 7
B. Jenis Kelamin 8
C. Pendidikan terakhir 9
D. Pekerjaan 10

BAB IV. HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN) 11

BAB V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 12

A. Kesimpulan 12
B. Rekomendasi 14

LAMPIRAN-LAMPIRAN 15

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media masa dan jaringan sosial, sehingga memberikan dampak buruk terhadap pelayanan pemerintah, yang dapat menimbulkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat kepada pengguna layanan. Mengingat jenis layanan publik sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka Survei Kepuasan Masyarakat dapat menggunakan metode dan teknik survei yang sesuai. Berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB melaksanakan survei kepuasaan masyarakat dakam rangka pelaksaaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat untuk Penyelenggara Pelayanan Publik sekaligus persyaratan untuk dilakukan penilaian kembali dalam pencapaian Akreditasi oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

B. Tujuan dan Sasaran

Survei kepuasaan masyarakat ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB. Adapun sasaran-sasaran Survei Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan di Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB.
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas Pelayanan di Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB.
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB.

C. Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan survei.

C.1 Persiapan

Sebelum melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat beberapa persiapan yang perlu perhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana

  Pelaksanaan survei dibantu dengan menggunakan aplikasi yang sudah disiapkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, sehingga dapat dilaksanakan secara mandiri oleh pengguna layanan.

C.2 Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 9 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu tentang Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) dari petugas.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner akan secara otomatis masuk aplikasi mengenai umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

C.3 Waktu Survei

Pengukuran / Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan I tahun 2022 di Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB ini dilaksanakan pada bulan Januari 2022 – Maret 2022.

BAB II
METODOLOGI PENELITIAN

A. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER). Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu tiga bulanan atau triwulan.

B. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

C. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB, artinya Responden dalam survei ini yaitu siapa saja yang telah mendapatkan pelayanan di Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB.

D. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB.

E. Variabel Pengukuran SKM

Variabel pada pengukuran ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat untuk

Penyelenggara Pelayanan Publik yang terdiri dari 9 ruang lingkup, antara lain:

1. **Persyaratan**

   Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. **Sistem, Mekanisme dan Prosedur**

   Sistem, Mekanisme dan Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. **Waktu Pelayanan**

   Waktu Pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. **Biaya / Tarif**

   Biaya / Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. **Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan**

   Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. **Kompetensi Pelaksana**

   Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. **Perilaku Pelaksana**

   Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. **Sarana dan Prasarana**

   Sarana dan Prasarana adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.

9. **Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan**

   Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data pada pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB ini digunakan analisis statistik deskriptif.

Kesembilan ruang lingkup tersebut di atas, selanjutnya disusun ke dalam kuesioner dengan 9 item, dengan empat *option* jawaban. Adapun pensekorannya menggunakan skala likert, dengan skor 1 sampai dengan 4. Analisis selanjutnya mengkonversi ke dalam skala 100, dan kategorisasi mutu pelayanan di Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB ditentukan sebagai berikut:

Tabel 1.
Kategori Mutu Pelayanan

No.	Mutu Pelayanan	Norma Skor	
		Skala 100	Skala 1-4
1.	A (Sangat Baik)	88,31 – 100,00	3,5324 – 4,000
2.	B (Baik)	76,61 – 88,30	3,0644 – 3,532
3.	C (Kurang Baik)	65,00 – 76,60	2,60 – 3,064
4.	D (Tidak Baik)	25,00 – 64,99	1,00 – 2,5996

BAB III
PROFIL RESPONDEN

A. Umur

Tabel 2

Data Umur responden

No	Usia	Frekuensi	%
1	18 - 28	73	29,20
2	29 - 39	94	37,60
3	40 - 49	57	22,80
4	50-59	19	7,60
5	60-69	7	2,80
	Jumlah	250	100,0

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas mayoritas responden pada penelitian ini berumur 29-39 tahun (37,60 %).

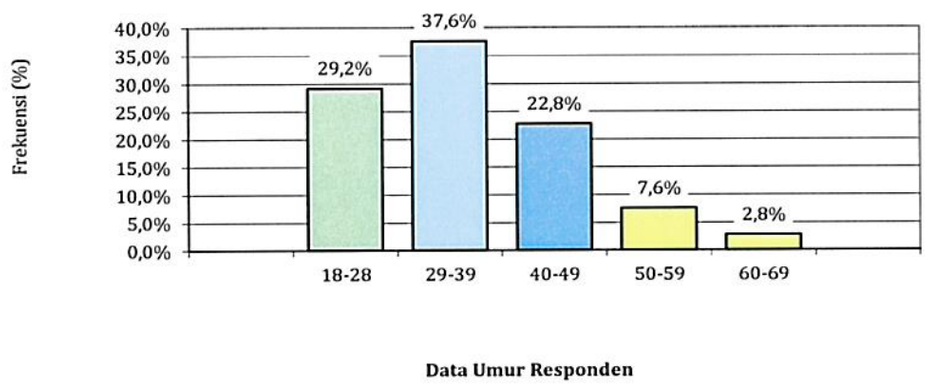

B. Jenis Kelamin

Tabel 3

Responden Menurut Karakteristik Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	%
1	Laki-laki	161	64,4
2	Perempuan	89	35,6
	Jumlah	250	100,0

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas mayoritas responden pada penelitian ini berjenis kelamin laki-laki sebanyak 161 orang (64,4 %).

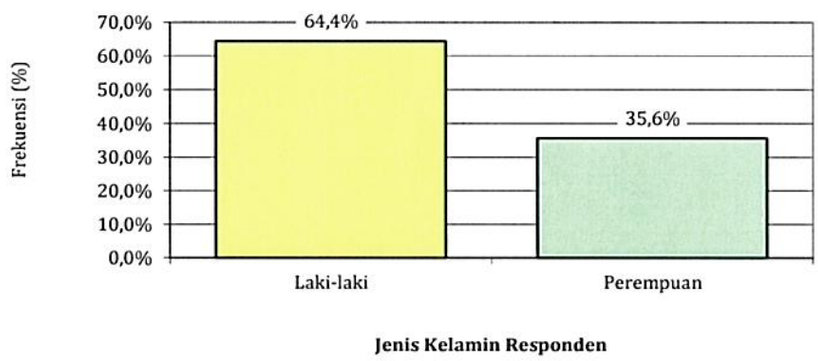

C. Pendidikan Terakhir

Tabel 4

Tingkat pendidikan responden

	Pendidikan Terakhir	Jumlah	%
1	Tidak sekolah	0	0,0
2	SD	8	3,2
3	SLTP	8	3,2
4	SLTA	71	28,4
5	Diploma (I, II dan III)	14	5,6
6	S.1	136	54,4
7	Pasca Sarjana	13	5,2
	Jumlah	250	100,0

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas mayoritas responden pada penelitian ini berpendidikan S.1 sebanyak 136 orang (54,4 %).

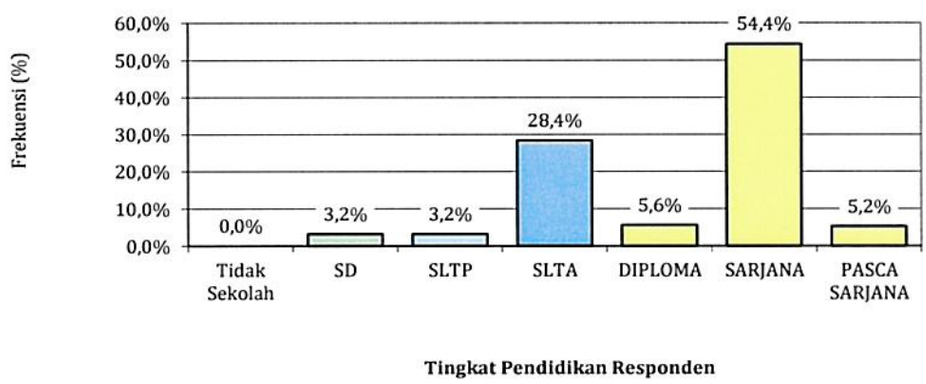

D. Pekerjaan

Tabel 5

Responden Menurut Karakteristik Pekerjaan

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	%
1	PNS	7	2,8
2	TNI	0	0,0
3	POLRI	22	8,8
4	Swasta	26	10,4
5	Wirausaha	26	10,4
6	Kontrak	0	0,0
7	Lainnya	169	67,6
	Jumlah	250	100,00

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas mayoritas responden pada penelitian ini bepekerjaan Lainnya seperti Advokat, Petani dll disebutkan dalam angket sebanyak 169 orang (67,6 %).

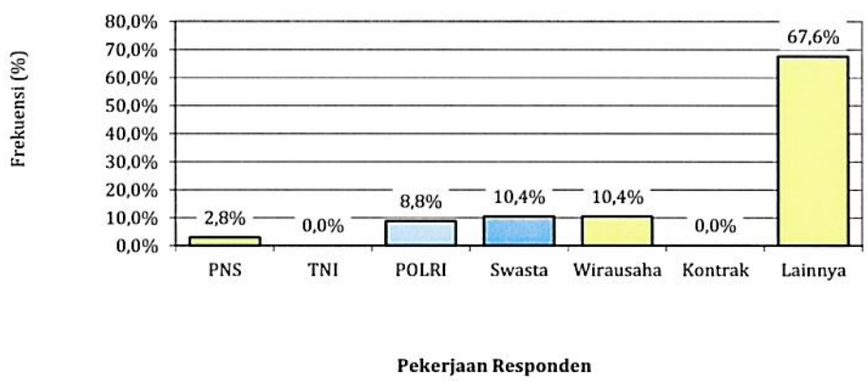

BAB IV
HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN

Berdasarkan survei kepuasan masyarakat di Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB melalui data Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) dan hasil analisis data yang telah dilakukan (lihat lampiran) diketahui bahwa Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB sebesar **95,41 %** (IKM sebesar **3,82**) berada pada kategori "SANGAT BAIK" (pada interval 88,31 s/d 100,00).

Hasil SKM tersebut di atas, terdiri dari sembilan ruang lingkup, analisis selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil analisis terhadap kesembilan ruang lingkup tersebut.

Tabel 6
Rata-rata Skor dan Peringkat pada Setiap Ruang Lingkup
Pengukuran Survei Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan
di PN Bantul

No.	Ruang Lingkup	Rata-rata Skor	Kategori	Peringkat
1.	Persyaratan	3.888	Sangat Baik	**2**
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3.764	Sangat Baik	**7**
3.	Waktu Pelayanan	3.648	Sangat Baik	**9**
4.	Biaya/Tarif	3.884	Sangat Baik	**3**
5.	Produk Layanan	3.820	Sangat Baik	**5**
6.	Kompetensi Pelaksana	3.756	Sangat Baik	**8**
7.	Perilaku Pelaksana	3.832	Sangat Baik	**4**
8.	Sarana dan Prasarana	3.768	Sangat Baik	**6**
9.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.988	Sangat Baik	**1**

BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data terhadap data penelitian ini, disimpulkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB Triwulan III tahun 2021 sebesar **95,41 %** (IKM sebesar **3,82**) dan berada pada kategori **SANGAT BAIK**. Adapun kesimpulan pada masing-masing ruang lingkup sebagai berikut :

1. Persyaratan Pelayanan di Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB berada pada kategori **SANGAT BAIK.**
2. Prosedur pelayanan di Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB berada pada kategori **SANGAT BAIK.**
3. Waktu Pelayanan di Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB pada kategori **SANGAT BAIK.**
4. Biaya/ Tarif pelayanan di Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB pada kategori **SANGAT BAIK BAIK.**
5. Produk Layanan di Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB pada kategori **SANGAT BAIK.**
6. Kompetensi Pelaksana di Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB pada kategori **SANGAT BAIK.**
7. Perilaku Pelaksana Pelayanan di Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB pada kategori **SANGAT BAIK.**
8. Sarana dan Prasarana di Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB pada kategori **SANGAT BAIK.**
9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan di Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB pada kategori **SANGAT BAIK.**

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB, berdasarkan peringkat ruang lingkupnya, diperoleh hasil sebagai berikut :

Nomor	Ruang Lingkup	Nilai	Kategori	Peringkat
1	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	**3.988**	Sangat Baik	**1**
2	Persyaratan	**3,888**	Sangat Baik	**2**
3	Biaya/Tarif	**3,884**	Sangat Baik	**3**
4	Perilaku Pelaksana	**3,832**	Sangat Baik	**4**
5	Produk Layanan	**3,820**	Sangat Baik	**5**
6	Sarana dan Prasarana	**3,768**	Sangat Baik	**6**
7	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	**3,764**	Sangat Baik	**7**
8	Kompetensi Pelaksana	**3,756**	Sangat Baik	**8**
9	Waktu Pelayanan	**3,648**	Sangat Baik	**9**

B. Rekomendasi

Kepada jajaran manajemen dan seluruh pegawai di Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB, hendaknya mempertahankan pelayanannya khususnya pada ruang lingkup :

1. **Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan** yang berdasarkan hasil survei ruang lingkup ini memperoleh nilai tertinggi yaitu sebesar **3,988** berada pada interval skor 3,5324 s/d 4,00 kategori "**sangat baik**"
2. **Persyaratan** yang berdasarkan hasil survei ruang lingkup ini memperoleh nilai sebesar **3,888** berada pada interval skor 3,5324 s/d 4,00 kategori "**sangat baik**"
3. **Biaya/Tarif** yang berdasarkan hasil survei ruang lingkup ini memperoleh nilai sebesar **3,884** berada pada interval skor 3,5324 s/d 4,00 kategori "**sangat baik**" **.**

Sedangkan 3 (tiga) ruang lingkup terendah yang harus ditindak lanjuti meliputi :

1. Ruang Lingkup Waktu Pelayanan;
   Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu Pengadilan dalam memberikan pelayanan?
2. Ruang lingkup Kompetensi Pelaksana;
   Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan?
3. Ruang lingkup Sistem, Mekanisme dan Prosedur;
   Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan pada Pengadilan?

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB
Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711
Telp/Faks: 0274 – 367348,
Laman: www.pn-bantul.go.id
Pos-el: surat@pn-bantul.go.id
BANTUL

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PENGGUNA PENGADILAN PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB TRIWULAN I TAHUN 2022

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

PENGADILAN NEGERI BANTUL

NILAI INDEKS

3,82 / 95,41 %

Periode 3 Januari 2022 sampai 31 Maret 2022

PENGGUNA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

RESPONDEN

Jumlah		: 250 orang
Jenis kelamin	Laki-laki	: 161 orang
	Perempuan	: 89 orang
Pendidikan	Belum Sekolah	: 0 orang
	SD	: 8 orang
	SLTP	: 8 orang
	SLTA	: 71 orang
	D.I, II, III	: 14 orang
	S.1	: 136 orang
	S.2	: 13 orang

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT

A

LAPORAN HASIL

SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
DI PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB
TRIWULAN I TAHUN 2022
Periode Januari 2022 – Maret 2022

Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi RI
Nomor 14 Tahun 2017

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB
KABUPATEN BANTUL, D.I. YOGYAKARTA

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB
Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711
Telp/Faks: 0274 – 367348,
Laman: www.pn-bantul.go.id
Pos-el: surat@pn-bantul.go.id
BANTUL

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN
HASIL SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
PENGGUNA PENGADILAN
DI PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB
TRIWULAN I TAHUN 2022

Berdasarkan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
RI
Nomor 14 Tahun 2017

Disahkan di Bantul
Pada hari Jumat, Tanggal 01 April 2022
KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

AMINUDDIN, S.H., M.H.
NIP. 196579031992031003

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, telah disusunnya Laporan Indeks Persepsi Korupsi di Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB Triwulan I Tahun 2022 ini.

Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan public, sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-201 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Sebagai pertanggungjawaban atas kinerja Tim Survey maka disusun Laporan ini yang dimaksudkan untuk memberikan informasi bahwa Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang bersih dari Korupsi.

Semoga hasil survey ini dapat membantu memberikan masukan yang positif bagi Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB dan sekaligus menjadi acuan untuk meningkatkan pelayanan bagi pengguna layanan pengadilan serta sebagai bahan untuk mengevaluasi kinerja organisasi agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih efektif dan efisien.

Demikian Laporan Indeks Persepsi Korupsi pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB Triwulan I Tahun 2022 ini disusun dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bantul, 31 Maret 2022

Koordinator Tim survey

M. AWAB ABDULAH, S.H.

DAFTAR ISI

BAB I ..... **Error! Bookmark not defined.**

PENDAHULUAN 1

1.1.Latar Belakang 1

1.2.Maksud Dan Tujuan ..... **Error! Bookmark not defined.**

1.3.Landasan Hukum ..... **Error! Bookmark not defined.**

1.4.Pelaksanaan Survei 3

BAB II 5

METODOLOGI 5

2.1.Metode Penelitian 5

2.2.Populasi Dan Sampel 5

2.3.Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis 5

2.4.Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control 5

2.5.Teknik Analisis Data 6

2.6.Tahapan pelaksanaan 6

BAB III 9

INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI 9

3.1.Profil responden 9

3.2.Indeks persepsi Anti korupsi per indikator 14

3.3.Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan 16

BAB IV 17

PENUTUP 17

4.1.Kesimpulan 17

4.2.Rekomendasi 18

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitment tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB menjadi salah satu Instansi Pemerintah yang menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi adalah untuk mengukur tingkat kepuasaan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayan publik.

1.3. Landasan Hukum

a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
f) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.
h) Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021, Tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan dibawahnya.

1.4. Pelaksanaan survei

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan Survey persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu perhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana

  Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1230/DJU/SK/HM.02.3/4/2021 tentang Pemberlakuan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (Sisuper), pelaksanaan survei dibantu dengan menggunakan aplikasi yang sudah disiapkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, sehingga dapat dilaksanakan secara mandiri oleh pengguna layanan.
- Penyusunan Jadwal

  Penyusunan rencana dan pelaksanaan Survey dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (Sisuper).
- Pengisian Kuesioner pada Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (Sisuper) oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya tersimpan pada Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (Sisuper). *http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/pengadilan/*
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner pada Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (Sisuper) kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Waktu Survei

Pengukuran / Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Triwulan I tahun 2022 di Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB ini dilaksanakan pada bulan Januari 2022 – Maret 2022.

BAB II
METODOLOGI PENELITIAN

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB, artinya Responden dalam survei ini yaitu siapa saja yang telah mendapatkan pelayanan di Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER). Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu tiga bulanan atau triwulan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara

tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPAK.

2.1. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan indeks anti korupsi menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi anti korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi anti korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan Jumlah Kuisioner yang digunakan dalam penelitian responden adalah berdasarkan jumlah resopnden yang dilayani dalam kurun waktu 3 bulanan.

Kedua, menentukan jumlah nilai kuisioner dimana maksimal dalam penelitian ini X nilai maksimal (4) X Jumlah Indikator quisioner (10)).

Ketiga, menentukan jumlah nilai riil quisioner (Jumlah reponden X jumlah nilai riil X Jumlah Indikator quisioner (10).

Keempat, menentukan Nilai capaian yaitu Nilai Riil dibagi Nilai maksimal X 100 %.

Kelima, menentukan nilai IPAK yaitu Nilai capaian X skala indeks (4).

Skala indeks persepsi Anti korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.1. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan tools untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1

Model alur penyusunan survei IPAK menuju Zona Integritas

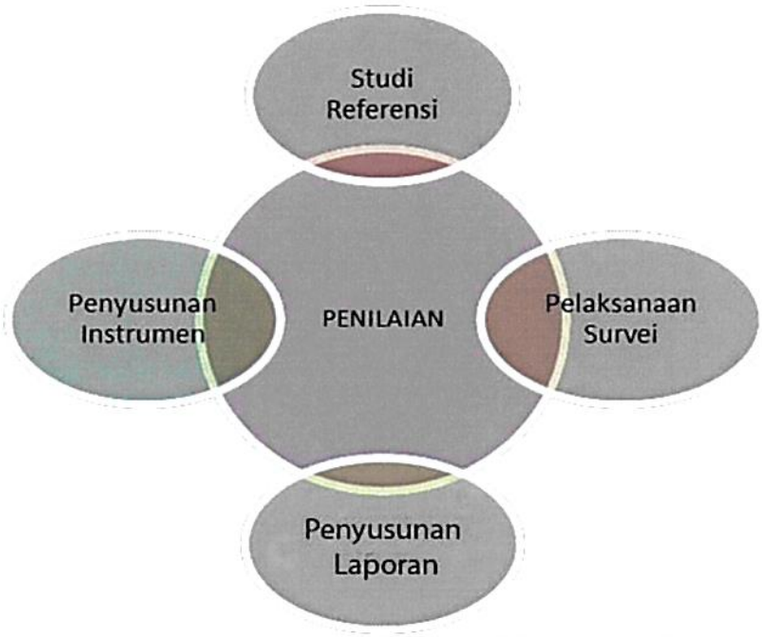

Tabel 2

Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Anti Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transaksi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Biaya
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 3

Perhitungan Indek Survey Persepsi Anti Korupsi

BOBOT IPAK

Nomor	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPAK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	Tidak baik	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	Kurang baik	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	Baik	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	Sangat baik	Bersih dari korupsi

BAB III

INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

3.1. Profil responden

3.1.1 Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, sebesar 53,72 % pengakses layanan di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB mayoritas memiliki latar Pendidikan Sarjana S1.

Tabel 4.
Tingkat pendidikan responden

	Pendidikan Terakhir	Jumlah	%
1	Tidak sekolah	0	0,00
2	SD	6	2,48
3	SLTP	10	4,13
4	SLTA	73	30,17
5	Diploma (I, II dan III)	11	4,55
6	S1	130	53,72
7	Pasca Sarjana	12	4,95
	Jumlah	242	100,00

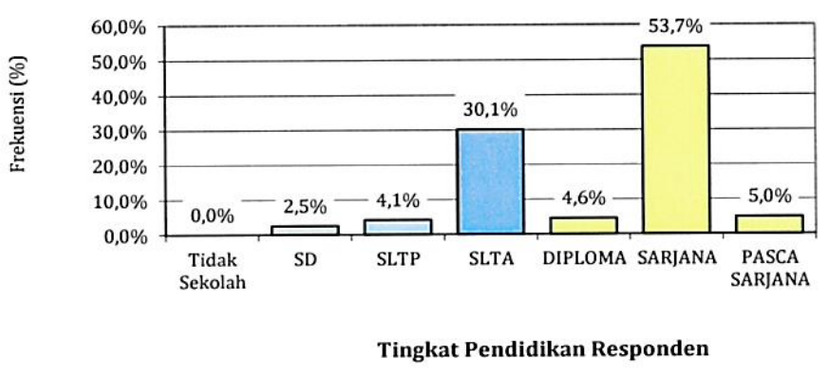

3.1.2 Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 67,77 % responden pengguna layanan Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB memiliki pekerjaan Lainnya, selebihnya Swasta, Wirausaha, POLRI.

Tabel 5.
Jenis pekerjaan responden

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	%
1	PNS	4	1,65
2	TNI	1	0,41
3	POLRI	21	8,68
4	Swasta	27	11,16
5	Wirausaha	24	9,92
6	Kontrak	0	0,00
7	Lainnya	164	67,77
	Jumlah	242	100,00

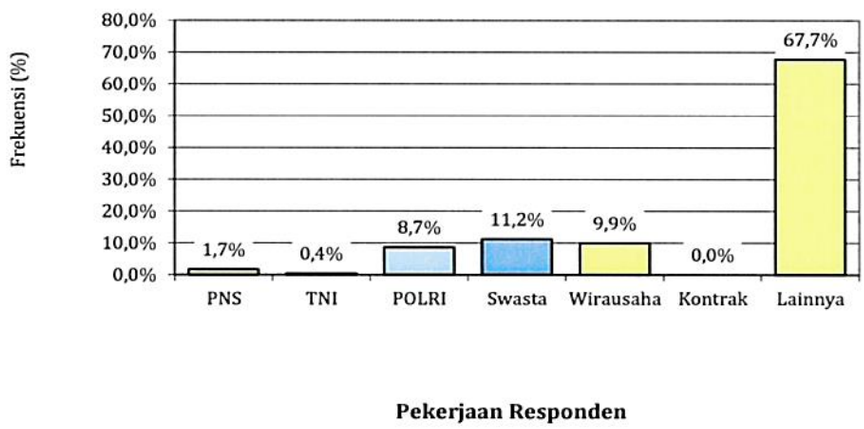

3.1.3 Kelompok umur responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia Menengah yaitu pada usia antara 29 tahun s/d 39 tahun. (38,02 %) disusul usia 18 tahun s/d 28 tahun (29,10 %), Usia 40 tahun s/d 49 tahun (23,55 %). Bagi kelompok usia di atas 50 tahun keatas jumlah responden semakin mengecil (10,33 %).

Tabel 6.
Data Umur responden

No	Usia	Frekuensi	%
1	18 - 28	68	28,10
2	29 - 39	92	38,02
3	40 - 49	57	23,55
4	50 - 59	16	6,61
5	60 - 69	9	3,72
	Jumlah	242	100,00

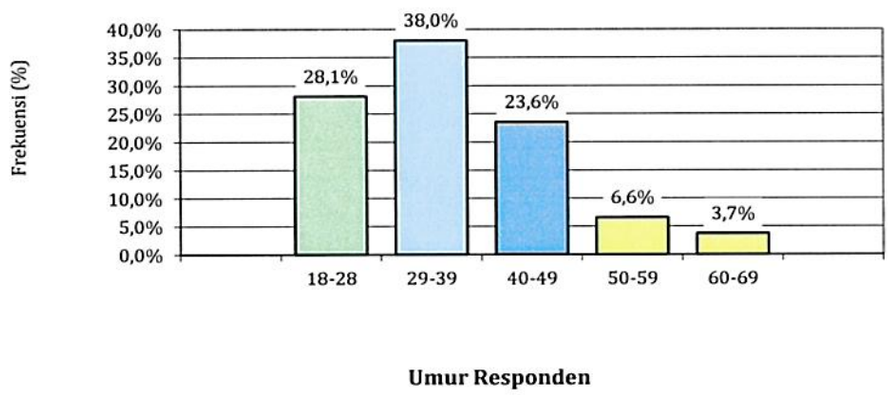

3.1.4 Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin Responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan Jenis kelamin Laki-laki, yaitu sebesar 66,53 %.

Tabel 7.
Jenis Kelamin responden

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	%
1	Laki-laki	161	66,53
2	Perempuan	81	33,47
	Jumlah	242	100,00

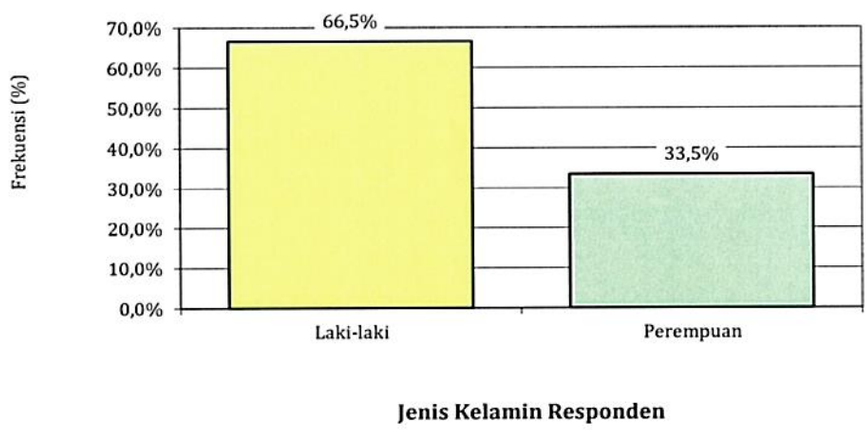

3.1.5 Layanan yang digunakan

Jika kita melihat jenis layanan yang digunakan oleh pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan telah menerima Layanan Hukum / Informasi (38,02 %) disusul Layanan Perdata (29,10 %).

Tabel 8.
Layanan yang digunakan

No	Layanan	Frekuensi	%
1	Pidana	39	16,11
2	Perdata	77	31,82
3	Hukum / Informasi	97	40,08
4	Administrasi Umum	27	11,15
5	E – court	2	0,83
	Jumlah	242	100,00

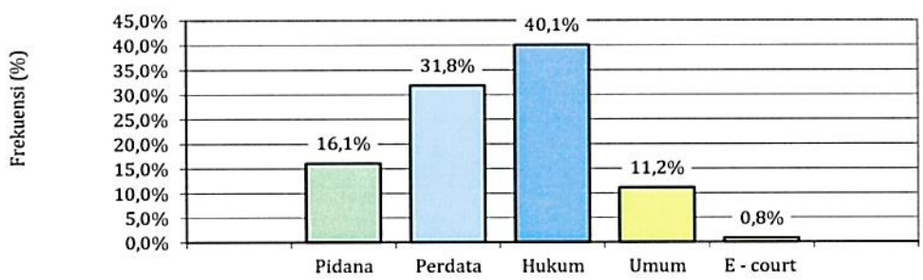

Layanan yang digunakan

3.2. Indeks persepsi anti korupsi per indikator

3.2.1 Indikator Manipulasi Peraturan

Dari hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil Nilai capaian Indeks Persepsi Anti Korupsi **3,979** dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB Sangat baik atau bersih dari Manipulasi Peraturan.

3.2.2 Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil Nilai capaian Indeks Persepsi Anti Korupsi **3,992** dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB Sangat baik atau bersih dari Penyalahgunaan Jabatan.

3.2.3 Indikator Menjual Pengaruh

Dari persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil Nilai capaian Indeks Persepsi Anti Korupsi **3,988** dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB Sangat baik atau bersih dari tindakan Menjual Pengaruh kepada pihak.

3.2.4 Indikator Transaksi Biaya

Dari hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya ini menunjukkan hasil Nilai capaian Indeks Persepsi Anti Korupsi **3,835** dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB Sangat baik atau bersih dari tindakan Transaksi Biaya tidak wajar.

3.2.5 Indikator Biaya Tambahan

Dari persepsi responden pada indikator Biaya tambahan ini menunjukkan hasil Nilai capaian Indeks Persepsi Anti Korupsi **3,975** dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB Sangat baik atau bersih dari tindakan meminta Biaya Tambahan di luar biaya resmi.

3.2.6 Indikator Hadiah

Dari hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil Nilai capaian Indeks Persepsi Anti Korupsi **4,000** dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB Sangat baik atau bersih dari tindakan menerima Hadiah atau gratifikasi.

3.2.7 Indikator Transparansi Biaya

Dari hasil persepsi responden pada indikator Transparansi biaya ini menunjukkan hasil Nilai capaian **3,934** dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB Sangat baik atau bersih dalam pelaksanaan Transparansi Biaya.

3.2.8 Indikator Percaloan

Dari hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini Nilai capaian Indeks Persepsi Anti Korupsi **3,988** dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB Sangat baik atau bersih dari tindakan Percaloan.

3.2.9 Indikator Perbuatan Curang

Dari hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan curang ini Nilai capaian Indeks Persepsi Anti Korupsi **3,983** dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB Sangat baik atau bersih dari tindakan Perbuatan Curang.

3.2.10 Indikator Transaksi Rahasia

Dari hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini Nilai capaian Indeks Persepsi Anti Korupsi **4,000** dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB Sangat baik atau bersih dari Transaksi Rahasia.

3.3. Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB sebesar **99,18 %**, masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan Sangat baik BERSIH DARI KORUPSI, Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 3,26 – 4,00 (**3,97**).

BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Anti Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB memiliki Nilai Capaian **99,18 %** Indeks Persepsi Anti Korupsi **3,97** atau masuk pada kategori Bersih dari Korupsi.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki Nilai Capaian sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, Nilai Capaian indeks 3,979.
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, Nilai Capaian indeks 3,992.
3. Indikator Menjual Pengaruh, Nilai Capaian indeks 3,988.
4. Indikator Transaksi Biaya, Nilai Capaian indeks 3,835.
5. Indikator Biaya Tambahan, Nilai Capaian indeks 3,975.
6. Indikator Hadiah, Nilai Capaian indeks 4,000.
7. Indikator Transparansi Biaya, Nilai Capaian indeks 3,934.
8. Indikator Percaloan, Nilai Capaian indeks 3,988.
9. Indikator Perbuatan Curang, Nilai Capaian indeks 3,983.
10. Indikator Transaksi Rahasia, Nilai Capaian indeks 4,000.

Tabel 8
Peringkat pada Setiap Ruang Lingkup
Pengukuran Survei Persepsi Anti Korupsi Layanan Pengadilan
di PN Bantul

No.	Ruang Lingkup	Rata-rata Skor	Kategori	Peringkat
1.	Manipulasi Peraturan	3,979	Sangat Baik	**8**
2.	Penyalahgunaan Jabatan	3,992	Sangat Baik	**3**
3.	Menjual Pengaruh	3,988	Sangat Baik	**4**
4.	Transaksi Biaya	3,835	Sangat Baik	**10**
5.	Biaya Tambahan	3,975	Sangat Baik	**7**
6.	Hadiah	4,000	Sangat Baik	**1**
7.	Transparansi Biaya	3,934	Sangat Baik	**9**
8.	Percaloan	3,988	Sangat Baik	**5**
9.	Perbuatan Curang	3,983	Sangat Baik	**6**
10.	Transaksi Rahasia	4,000	Sangat Baik	**2**

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB Triwulan 1 Tahun 2022 tersebut di atas, menunjukkan nilai capaian **99,18 %** atau indeks **3,97** atau masuk pada persepsi Bersih dari Korupsi. Dari sepuluh indikator tersebut menunjukkan ada 3 (tiga) unsur tertinggi yang wajib dipertahankan meliputi :

1. **Hadiah** yang berdasarkan hasil survei ruang lingkup ini memperoleh nilai tertinggi yaitu sebesar **4,000** berada pada interval skor 3,5324 s/d 4,00 kategori "**sangat baik**"
2. **Transaksi Rahasia** yang berdasarkan hasil survei ruang lingkup ini memperoleh nilai sebesar **4,000** berada pada interval skor 3,5324 s/d 4,00 kategori "**sangat baik**"

3. **Penyalahgunaan Jabatan** yang berdasarkan hasil survei ruang lingkup ini memperoleh nilai sebesar **3,992** berada pada interval skor 3,5324 s/d 4,00 kategori "**sangat baik**".

Sedangkan 3 (tiga) ruang lingkup terendah yang harus ditindak lanjuti meliputi:

1. Unsur 4 : Indikator Transaksi Biaya.
   Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan?
2. Unsur 7 : Indikator Transparansi Biaya.
   Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan?
3. Unsur 5 : Indikator Biaya Tambahan.
   Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB
Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711
Telp/Faks: 0274 – 367348,
Laman: www.pn-bantul.go.id
Pos-el: surat@pn-bantul.go.id
BANTUL

INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK) PENGGUNA PENGADILAN PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB TRIWULAN I TAHUN 2022

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

PENGADILAN NEGERI BANTUL

NILAI INDEKS

3,97 / 99,18 %

Periode 3 Januari 2022 sampai 31 Maret 2022

PENGGUNA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

RESPONDEN

Jumlah		: 242 orang
Jenis kelamin	Laki-laki	: 161 orang
	Perempuan	: 81 orang
Pendidikan	Belum Sekolah	: 1 orang
	SD	: 2 orang
	SLTP	: 1 orang
	SLTA	: 13 orang
	D.I, II, III	: 14 orang
	S.1	: 104 orang
	S.2	: 5 orang

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

Jl. Prof. Dr. SUPOMO, SH, No. 4 BANTUL - DIY 55711
Telp/Fax. 0274 - 367348, *Situs: www.pn-Bantul.go.id*
Pos-el:surat@pn_Bantul.go.id

Nomor : W.13.05/ 065 /HK.01/IV/2022 — Bantul, 26 April 2022
Lampiran : -
Perihal : Tindak Lanjut 3 (tiga) nilai terendah survei SiSuper **triwulan** I Tahun 2022

Kepada Yth.
Yth. Direktur Jenderal BADILUM
Di –
JAKARTA

1. SURVEY INDEK PERSEPSI ANTI KORUPSI :

Kriteria

APLIKASI SURVEY PELAYANAN ELEKTRONIK
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

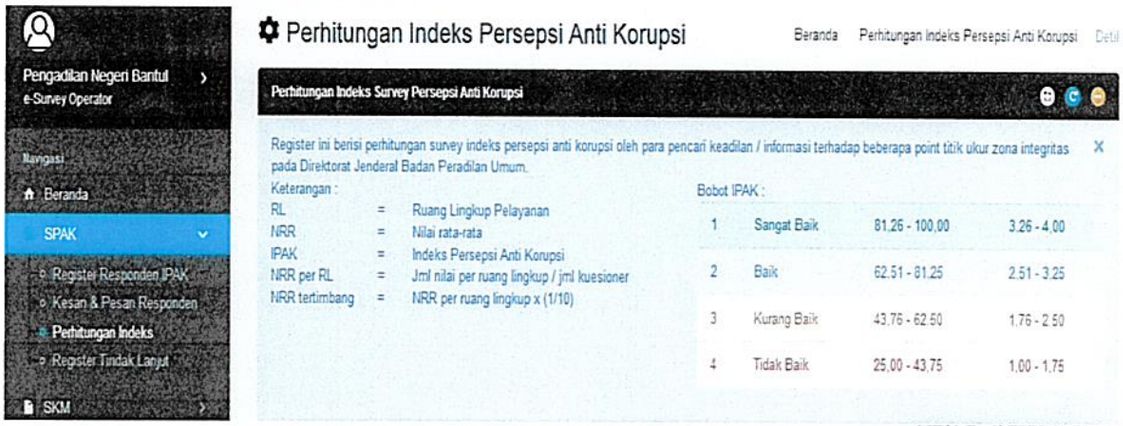

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 3,4 dan 5
Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 ByPass, Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat
Telp. (021) 29079176 Ext.1521, Fax. (021) 29079201

PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
Periode 1 Januari 2022 sampai 31 Maret 2022

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

NILAI INDEKS

3,97 / 99,18%

Jumlah	242 RESPONDEN	
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 161	
	PEREMPUAN : 81	
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0	Diploma 2 : 1
	SD : 6	Diploma 3 : 9
	SMP : 10	S1 : 130
	SMU : 73	S2 : 11
	Diploma 1 : 1	S3 : 1
Pekerjaan	PNS : 4	SWASTA : 27
	TNI : 1	WIRAUSAHA : 24
	POLRI : 21	TENAGA KONTRAK : 1
	LAINNYA : 164	

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

1. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ?	3.835
2. Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ?	3.934
3. Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?	3.975

Akan tetapi dari indeks diatas, terdapat 3 (tiga) indikator Persepsi Anti Korupsi yang bernilai rendah dan perlu ditindaklanjuti, yaitu :

1. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ? 3,836;

2. Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ? 3,934;
3. Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan ? 3,975;

Tindak lanjut :

1. Bahwa tindak lanjut : Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan : Bahwa Pengadilan Negeri Bantul sudah menyediakan layanan WhatsApp Virtual BIMA (Bantul Information Media Asisten) dengan nomor.WA 082324210182 dan Website Pengadilan Negeri Bantul untuk mengetahui informasi tentang tarif/biaya;
2. Bahwa tindak lanjut : Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan : Bahwa kami mengevaluasi kinerja bagian PTSP dan petugas layanan memastikan penerima layanan sudah menerima keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran semua melalui kasir di PTSP;
3. Bahwa tindak lanjut : Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan : Bahwa di Pengadilan penerima layanan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa adanya biaya tambahan dan besaran tarif sudah ditempel dan setiap pencari layanan dapat menghitung sendiri berapa besaran tarif yang akan dikeluarkan;

2. SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT :

Kriteria

APLIKASI SURVEY PELAYANAN ELEKTRONIK
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 3,4 dan 5
Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 ByPass, Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat
Telp. (021) 29079176 Ext.1521, Fax. (021) 29079201

PUBLIKASI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
Periode 1 Januari 2022 sampai 31 Maret 2022

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

NILAI INDEKS

3,82 / 95,41%

Jumlah	250 RESPONDEN	
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 161	
	PEREMPUAN : 89	
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0	Diploma 2 : 1
	SD : 8	Diploma 3 : 12
	SMP : 8	S1 : 136
	SMU : 71	S2 : 12
	Diploma 1 : 1	S3 : 1
Pekerjaan	PNS : 7	SWASTA : 26
	TNI : 0	WIRAUSAHA : 26
	POLRI : 22	TENAGA KONTRAK : 0
	LAINNYA : 169	

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :
1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu Pengadilan dalam memberikan pelayanan ? 3,648
2. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan ? 3,756
3. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan pada Pengadilan ? 3,764

Akan tetapi dari indeks diatas, terdapat 3 (tiga) indikator Persepsi Anti Korupsi yang bernilai rendah dan perlu ditindaklanjuti, yaitu :

1. Bagaimana pendapat saudara tentang kecepatan waktu Pengadilan dalam memberikan pelayanan ? 3,648 ;
2. Bagaimana pendapat saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan ? 3,756 ;
3. Bagaimana pemahaman saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan pada Pengadilan? 3,764 ;

Tindak lanjut :

1. Bahwa tindak lanjut : Bagaimana pendapat saudara tentang kecepatan waktu Pengadilan dalam memberikan pelayanan : kemampuan petugas dalam pelayanan sesuai SOP yang telah dikuasainya dan petugas telah memahami pekerjaannya sehingga petugas akan memberikan pelayanan dengan cepat dan efisien ;
2. Bahwa tindak lanjut : Bagaimana pendapat saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan : kompetensi / kemampuan petugas dalam pelayanan baik, petugas memberikan pelayanan sesuai dengan SOP sehingga petugas sangat memahami pekerjaannya sehingga petugas akan bekerja lebih cepat dan efisien ;
3. Bagaimana pemahaman saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan pada Pengadilan : di pengadilan dilengkapi dengan brosur-brosur berupa pembuatan eraterang, tata cara pengaduan, prosedur memperoleh bantuan hukum, mekanisme gugatan sederhana, keterbukaan informasi publik, tata cara pendaftaran perkara melalui e-court dan telah ada aplikasi BIMA Virtual Asistan melalui WA 082324210182 untuk bertanya dan dijawab otomatis dua puluh empat (24) jam serta Layanan Langsung Jarak Jauh (LLJJ) secara Video Call untuk bertanya dan dijawab langsung oleh petugas PTSP pada jam kerja serta diberikan konpensasi keterlambatan pelayanan berupa souvenir serta memberikan pelayanan diluar jam kerja;

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya ;

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

PENGADILAN NEGERI BANTUL

AMINUDDIN, S.H, M.H.
NIP.196509031990021003

Arsip

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

Jl. Prof. dari. SUPOMO, SH, No. 4 BANTUL - DIY 55711
Telp/Fax. 0274 - 367348, *Situs: www.pn-Bantul.go.id*
Pos-el:surat@pn_Bantul.go.id

Nomor : W13.U5/OT.01.1/IV/2022 Bantul 21 April 2022
Lampiran : -
Hal : Monitoring dan Evaluasi
Indeks Kepuasan Masyarakat
Dan Indeks Persepsi Korupsi

KepadaYth.
1. Panitera Muda Hukum
2. Panitera Muda Pidana
3. Panitera Muda Perdata
4. Sdri. Dyah Pravitasiwi, S.H.

Di
Pengadilan Negeri Bantul

Dengan hormat,

Bersama ini dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk dapat menghadiri Monitoring dan Evaluasi Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Persepsi Korupsi untuk Triwulan I (bulan Januari 2022 s/d Maret 2022, yang dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Senin, 25 April 2022
Pukul :09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Panitera

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

Panitera Pengadilan Negeri Bantul

PENGADILAN NEGERI BANTUL

KASPENDI SEMBIRING, S.H.
NIP. 19680221 199603 1 001

DAFTAR HADIR
MONITORING DAN EVALUASI SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
TRIWULAN I (JANUARI 2022 S/D MARET 2022)

NO	NAMA/NIP.	GOL.	JABATAN	TANDA TANGAN
1	KASPENDI SEMBIRING, S.H. NIP. 19680221199603 1 001	IV/a	Panitera	
2	YULITA SRI WIDAYATI, S.H. NIP. 196412281986032002	III/d	Panitera Muda Hukum	
3	YUNTARINGSIH, S.H. NIP. 196110191986031003	III/d	Panitera Muda Pidana	
4	AS'ARI MAARIF, S.H., M.H NIP. 197601102006041003	III/b	Panitera Muda Perdata	
5.	DIAH PRAVITASIWI, S,H. NIP. 198510242009042005	III/c	PaniteraPengganti	

PENGADILAN NEGERI BANTUL

Pemimpin Rapat

KASPENDI SEMBIRING, S.H.
NIP. 19680221199603 1 001

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

Jl. Prof. dari. SUPOMO, SH, No. 4 BANTUL - DIY 55711
Telp/Fax. 0274 - 367348, *Situs: www.pn-Bantul.go.id*
Pos-el:surat@pn_Bantul.go.id

Hari,Tanggal	**Senin, 11 April 2022**			**KeteranganLampiran**	
Tempat	Ruang Panitera			√	Undangan
				√	Daftar Hadir
Waktu	09.00	**Selesai**	10.00	√	Foto Kegiatan
				BeriTandaberikut	√
PokokAcara	Monitoring dan Evaluasi Survei Indeks Kepuasan Masyarakat				
PimpinanRapat	KASPENDI SEMBIRING, S.H.				
Notulis	Diah Pravitasiwi, S.H				
Peserta	1. Para Panitera Muda 2. Sdri. Diah Pravitasiwi, S.H.				
Susunan Acara	1. Pembukaan 2. Monitoring dan Evaluasi Indeks Kepuasan Masyarakat 3. Monitoring dan Evaluasi Indeks Persepsi Korupsi 4. Penutup				

BAHASAN MATERI

1. Responden Indeks Kepuasan Masyarakat pada Triwulan I tahun 2022 berjumlah 250 (dua ratus lima puluh) responden.
2. Nilai hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat pada periode ini adalah 3,82/95,41% dengan kategori **SANGAT BAIK.**
3. Berdasarkan analisa terdapat nilai dengan peringat 3 terbawah, yaitu untuk ruang lingkup :
   a. Ruang lingkup waktu pelayanan dengan nilai **3,43**
   b. Ruang lingkup kompetensi pelaksana dengan nilai **3,43**
   c. Ruang lingkup sistem, mekanisme dan prosedur dengan nilai **3,46**
4. Dilakukan sosialisasi hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat pada Rapat Rutin Bulanan.

TANDA TANGAN

DIBUAT NOTULIS	**DISAHKAN PANITERA**
DIAH PRAVITASIWI, S.H.	KASPENDI SEMBIRING, S.H.

DokumentasiFoto
Monitoring danEvaluasi Survey IKM dan IPK
triwulan I Tahun 2022 (Januari 2022 s/d Maret 2022)

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

Jl. Prof. dari. SUPOMO, SH, No. 4 BANTUL - DIY 55711
Telp/Fax. 0274 - 367348, *Situs: www.pn-Bantul.go.id*
Pos-el:surat@pn_Bantul.go.id

Nomor : W13.U5/ 816 /OT.01.1/IV/2022 Bantul, 21 April 2022

Lampiran : -
Hal : Monitoring dan Evaluasi
Indeks Kepuasan Masyarakat
Dan Indeks Persepsi Korupsi

Kepada Yth.
1. Panitera Muda Hukum
2. Panitera Muda Pidana
3. Panitera Muda Perdata
4. Sdri. Dyah Pravitasiwi, S.H.

Di
Pengadilan Negeri Bantul

Dengan hormat,

Bersama ini dimohon kesediaan Bapak/Ibuuntuk dapat menghadiri Monitoring dan Evaluasi Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Persepsi Korupsi untuk Triwulan I periode Januari 2022 s/d Maret 2022, yang dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Senin, 25 April 2022
Pukul : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Panitera

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

Panitera Pengadilan Negeri Bantul

KASPENDI SEMBIRING, S.H.
NIP. 19680221 1996 03 1 001

DAFTAR HADIR
MONITORING DAN EVALUASI SURVEY INDEKS PERSEPSI KORUPSI
TRIWULAN I
PERIODE JANUARI 2022 S/D MARET 2022

NO	NAMA/NIP.	GOL.	JABATAN	TANDA TANGAN
1	KASPENDI SEMBIRING, SH. NIP. 196680221 1996 03 1 001	IV/a	Panitera	
2	YULITA SRI WIDAYATI, S.H. NIP. 196412281986032002	III/d	Panitera Muda Perdata	
3	YUNTARININGSIH, S.H., NIP. 197110191986031003	III/d	Panitera Muda Pidana	
4	AS'ARI MAARIF, S.H., M.H NIP. 197601102006041003	III/b	Panitera Muda Hukum	
5.	DIAH PRAVITASIWI, S,H. NIP. 198510242009042005	III/c	Panitera Pengganti	

Pemimpin Rapat

PENGADILAN NEGERI BANTUL

KASPENDI SEMBIRING, S.H.
NIP. 196680221 1996 03 1 001

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

Jl. Prof. dari. SUPOMO, SH, No. 4 BANTUL - DIY 55711
Telp/Fax. 0274 - 367348, *Situs: www.pn-Bantul.go.id*
Pos-el:surat@pn_Bantul.go.id

Hari,Tanggal	**Senin, 21 April 2022**		**KeteranganLampiran**
Tempat	Ruang Panitera		√ Undangan √ Daftar Hadir
Waktu	09.00 **Selesai** 10.00		√ Foto Kegiatan BeriTandaberikut √
Pokok Acara	Monitoring dan Evaluasi Survei Indeks Persepsi Korupsi		
Pimpinan Rapat	Kaspendi Sembiring, S.H.		
Notulis	Diah Pravitasiwi, S.H		
Peserta	1. Para Panitera Muda 2. Sdri. Diah Pravitasiwi, S.H.		
Susunan Acara	1. Pembukaan 2. Monitoring dan Evaluasi Indeks Kepuasan Masyarakat 3. Monitoring dan Evaluasi Indeks Persepsi Korupsi 4. Penutup		

BAHASAN MATERI

1. Responden Indeks Persepsi Korupsi pada Triwulan I tahun 2022 berjumlah 242 (dua ratus empat puluh dua) responden.
2. Nilai hasil Survei Indeks Persepsi Korupsi pada periode ini adalah 3,97 / 99,18 % dengan kategori **Bersih dari Korupsi.**
3. Berdasarkan analisa terdapat nilai dengan peringat 3 terbawah, yaitu untuk ruang lingkup :
   a. Indikator transaksi biaya dengan nilai **3,69**
   b. Indikator Transparansi biaya dengan nilai **3,69**
   c. Indikatoe biaya tambahan dengan nilai **3,75**
4. Dilakukan sosialisasi hasil Survey Indeks Persepsi Korupsi pada Rapat Rutin Bulanan.

TANDA TANGAN

DIBUAT **NOTULIS**	**DISAHKAN** **PANITERA**
DIAH PRAVITASIWI, S.H.	**KASPENDI SEMBIRING, S.H.**

DokumentasiFoto
Monitoring dan Evaluasi Survey IKM dan IPK
Triwulan I Periode Januari 2022 s/d Maret 2022